

TESIS

**TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DALAM PENYERAHAN URUSAN
KONKUREN TERHADAP LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**



OLEH :

**GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H.
NIM. 031824153028**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2018/2019**

TESIS

**TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DALAM PENYERAHAN URUSAN
KONKUREN TERHADAP LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar

Magister Hukum

Oleh :

GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H.

NIM.031824153028

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

MINAT STUDI HUKUM PEMERINTAHAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

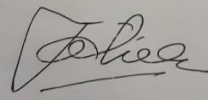
SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

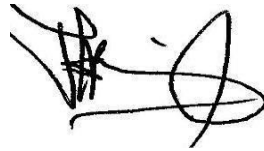
Tesis ini telah
disetujui, Tanggal
28 Januari 2022
Oleh :

DOSEN PEMBIMBING UTAMA,



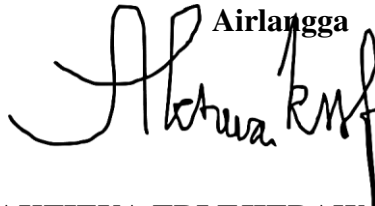
Prof.Dr.TATIEK SRI DJATMIATI.S.H..M.S.
NIP.195003061980032002

DOSEN PEMBIMBING KEDUA,



Dr.Rr.HERINI SITI AISYAH.S.H..M.H.
NIP.196912251995122001

Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas
Airlangga



Dr.AKTIEVA TRI LITRAWATI.S.H..M.Hum
NIP.196401071989032001

SURAT PERNYATAAN
KEORISINALITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

NAMA : GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H.
NIM : 031824153028
PROGRAM STUDI : S-2 ILMU HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
MINAT : HUKUM PEMERINTAHAN
ALAMAT : PERUMAHAN CITRA FAJAR GOLF ATS BLOK G
NOMOR 006 LINGKAR TIMUR – SIDOARJO
E-MAIL : clara_hadjon@yahoo.com
JUDUL : TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DALAM
PENYERAHAN URUSAN KONKUREN TERHADAP
LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Tesis ini berdasarkan hasil pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri baik untuk secara normatif dan bahan pustaka yang tercantum sebagai bagian dari tesis ini. Apabila terdapat karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Namun pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dan ketentuan sanksi lain yang sesuai dengan peraturan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Demikian pernyataan ini saya dalam keadaan sehat jasmani rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

SIDOARJO, 12 JANUARI 2022

Hormat saya,



GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan kekuatan-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister pada Program Ilmu Hukum dengan judul “ **TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DALAM PENYERAHAN URUSAN KONKUREN TERHADAP LAPORAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**”.

Terselesaikannya tesis dan studi penulis ini di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, tidak lepas dari adanya bantuan banyak pihak baik bantuan materiil maupun immateriil. Akhirnya, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. **Bapak Iman Prihandono, S.H.,M.H.,LL.M.,Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya beserta Para Wakil Dekan;
2. **Ibu Prof.Dr.Tatiek Sri Djatmiati, S.H.,M.S.**, selaku dosen pembimbing utama bersama **Ibu Dr.Rr. Herini Siti Aisyah, S.H.,M.H.**, selaku dosen pembimbing kedua yang memiliki peran dalam memberikan bimbingan sekaligus arahan, saran, motivasi serta dukungan sehingga tesis ini dapat terselesaikan;
3. **Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H.,M.Hum.**, **Bapak Dr.Suparto Wijoyo,S.H.,M.Hum.**, dan **Ibu Indrawati, S.H.,LL.M.** selaku Tim Penguji

yang telah berkenan menguji dan memberi nasihat sehingga tesis ini dapat terwujud sebagaimana adanya sekarang ini;

4. **Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn.,LL.M,** selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dalam menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
5. Seluruh jajaran dosen pengajara Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah mendidik dan membekali ilmu kepada penulis;
6. Para Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang membantu segala dalam proses pembelajaran hingga ujian selesai;
7. Orang tua dan kedua adik saya atas seluruh limpahan kasih sayang, semangat, nasihat, doa dan support yang begitu luar biasa;
8. Bapa Besar Prof.Dr.Philipus Mandiri Hadjon, S.H. yang telah memberikan arahan dan dukungan untuk menempuh ujian tesis dan studi hingga sekarang;
9. Sahabat Terbaik Regina Eka Riyana yang sudah 20 tahun lebih selalu memberikan dukungan dari jauh dan mendoakan yang terbaik;
10. Sahabat Terbaik SMA Patricia Prabawati Hartono, Natasya Maylovanny dan Maureen Octaviani Panggabean yang telah memberi dukungan, semangat, dan selalu mengingatkan akan segala hal dalam doa;
11. Sahabat Terbaik KMK Brigiitta S. dan Mas Kevin Patar Aruan yang sudah kuanggap Kakak telah memberikan support, doa, arahan, dan mendengarkan curhatanku;

12. Sahabat Terbaik Fakultas Hukum Universitas Airlangga Edbert S. Horman dan Vincentius Gegap Widyantoro yang mendukung serta memberi semangat dan selalu memberikan saran-saran;
13. Kak Sisil yang selalu mendoakan dan mendukung yang terbaik untuk penulis;
14. Tante Suster Theresia yang mendoakan dan memberikan semangat yang terbaik;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya. Maka, penulis berharap adanya saran dan kritik dapat dipergunakan untuk menyempurnakan tesis ini. Dengan kerendahan hati, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan masukan bagi mereka yang akan meneliti terhadap permasalahan yang sama.

Sidoarjo, 12 Januari 2020

GRATIA CLARA LENO HADJON, S.H.

ABSTRACT

The existence of government policies that are realized through work programs and set forth in government which is realized through work programs and set forth in budget implementation documents is one measure of the implementation of activities. So far, the policy for implementing activities has often relied on an applied system of activity budgets. Rarely is a policy or activity evaluated through the achievement of objectives.

The achievement of activity objectives which are reported at the end of each year is rarely evaluated regarding the success of whether these objectives have been achieved. This is quite worrying considering that the purpose of the government's policies and activities is to become a non-fixed target for the welfare of the community, which is not just a mere percentage of budget absorption.

On March 13, 2019, Government Regulation Number 13 of 2019 concerning Reports and Evaluation of the Implementation of Regional Government was promulgated. This regulation is an elaboration of Article 74 of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government stating that the provisions regarding regional government administration reports, accountability reports and summaries of regional government administration reports as well as procedures for evaluating regional government administration are as regulated in Article 69 paragraph (1) and Article 70 paragraph (5) is regulated by a government regulation.

Keywords: concurrent affairs, reports and evaluation of local government administration

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam pemerintahan yang diwujudkan melalui program kerja dan dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran merupakan salah satu ukuran pelaksanaan kegiatan. Selama ini kebijakan pelaksanaan kegiatan sering bertumpu pada system terapan anggaran kegiatan. Jarang sekali suatu kebijakan atau kegiatan tersebut dievaluasi melalui pencapaian tujuan.

Pencapaian tujuan kegiatan yang setiap akhir tahun dilaporkan sangat jarang sekali dievaluasi mengenai keberhasilan apakah tujuan tersebut tercapai. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat tujuan adanya kebijakan dan kegiatan pemerintah tersebut menjadi tidak tetap sasaran terhadap kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya sekedar angka presentase serapan anggaran belaka.

Tanggal 13 Maret 2019 telah diundangkanlah pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan penjabaran dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ketentuan mengenai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tata cara evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Kata Kunci : urusan konkuren, laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEORISINALITAS.....	
KATA PENGANTAR.....	I
ABSTRAK.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	7
1.4.Manfaat Penelitian.....	8
1.5.Tinjauan Pustaka.....	9
1.6.Metode Penelitian.....	12
1.6.1. Jenis Penelitian.....	12
1.6.2. Pendekatan Masalah.....	12
1.6.3. Sumber Bahan Hukum.....	13
1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5. Analisa Bahan Hukum.....	14
1.7.Pertanggungjawaban Sistematis.....	14

BAB II RATIO LEGIS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019.....	18
2.1.Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebelum dan Setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014.....	18
2.2.Perspektif Kewenangan Dalam Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	43
BAB III TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 2019 DALAM HUKUM ADMINISTRASI.....	50
3.1.TANGGUNG GUGAT URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	50
3.2.PERTIMBANGAN HUKUM PP 13 TAHUN 2019 DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	70
BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87